

JURNAL ILMIAH
PERAN POLDA DIY DALAM MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG



Disusun Oleh :

SILVANUS CHRISTIAN

NPM : 050509066
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Dan Penyelesaian
Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2015

**HALAMAN PENGESAHAN
JURNAL ILMIAH**

**PERAN POLDA DIY DALAM MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

Disusun Oleh :

SILVANUS CHRISTIAN

NPM	: 050509066
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa Hukum

**Telah Disetujui Oleh
Dosen Pembimbing
Pada Tanggal 29. Juni 2015**

Dosen Pembimbing,



PROF .DR. DRS. PAULINUS SOGE, SH., M.HUM

PERAN POLDA DIY DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Disusun oleh
Silvanus Christian

ABSTRACT

Indonesia is the country that have high number on human trafficking case. The Police of Indonesia have to deal with this problem. This is the reason why the writer choose to write about Role of Regional Police of Yogyakarta to Solve the case of human trafficking. The legal issue in this article is about how regional police of Yogyakarta deal with human trafficking case and whether the obstacle that regional police of Yogyakarta have to deal in this case. The type of this research that used in this research is the normative legal research. The source of data in this legal writing is from the study of literature and interview. The research take location at the regional police of Yogyakarta headquarter. Analysis method that uses by researcher is the qualitative method. Reasoning process that used is inductive method. The kind of role of regional police of Yogyakarta have to do to solve the human trafficking case is the pre-emptive, preventive, and repressive efforts. The Obstacle that Regional police of Yogyakarta in this case is about the society doesn't care that much about this case, the less human resources in regional police of Yogyakarta have ,the low rating of education in the society, and regional police of Yogyakarta have a trouble in getting the correct report, the weakness in coordination system with another law enforcement.

Keywords : The Police, Overcome, Criminal Act, Human Trafficking

Indonesia menempati peringkat teratas korban perdangan orang. Kepolisian Republik Indonesia harus menanggulangi tindak pidana perdanmngan orang. Hal ini yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang PERAN POLDA DIY DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERDANGAN ORANG. Permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah bagaimanakah peran Polda DIY dalam menaggulangi tindak pidana perdangan orang dan Apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh Polda DIY dalam menanggulangi tindak pidana perdagan orang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber data dalam penulisan hukum ini adalah data sekunder. Metode pengumpulan dalam penulisan hukum adalah studi

kepuustakaan dan wawancara. Lokasi penelitian dilakukan di Kepolisian DIY. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Proses penalaran yang digunakan adalah metode induktif. Peran Polda DIY dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang antara lain adanya upaya-upaya pre-emptif, preventif dan represif. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Polda DIY dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang yaitu masyarakat yang kurang peduli, identitas tersangka yang bertempat tinggal diluar kota, sarana dan prasarana Polda DIY yang kurang memadai, kurangnya sumber daya manusia kepolisian Polda DIY, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, Polda DIY kesulitan dalam memperoleh laporan dan lemahnya koordinasi antara penegak hukum.

Kata kunci : Kepolisian, menanggulangi, tindak pidana, perdagangan orang

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Kepolisian Republik Indonesia adalah kesatuan penegak hukum yang memelihara serta meningkatkan tertib hukum dan bersama-sama dengan segenap kekuatan pertahanan keamanan negara lainnya membina ketentraman masyarakat dalam wilayah negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat serta merupakan salah satu lembaga atau badan untuk menyidik serta menyelesaikan segala kasus pelanggaran hukum yang marak terjadi dikalangan masyarakat pada umumnya.

Menurut Sadjijono, Kepolisian mempunyai kata dasar polisi yang berasal dari bahasa Yunani yaitu *Politeia* yang berarti seluruh pemerintahan negara kota (polis).¹ Lebih lanjut dikatakan bahwa, Kepolisian di Indonesia

¹ Sadjijono., 2008, *Hukum Kepolisian Polri Dan Good Governance*, Pertama, Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm. 49.

pengorganisasiannya secara terpusat dan merupakan satu kesatuan sebagai Kepolisian Nasional yang pengendaliannya dipusatkan ditingkat Markas Besar Polri (Mabes Polri) dan diatur secara berjenjang dari Pusat sampai ketinggian Daerah.

Menurut Team Redaksi Fokus media Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI secara jelas menyebutkan bahwa fungsi kepolisian yaitu salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.²Salah satu bagian dari polisi yang sesuai dengan fungsinya adalah reserse.

Reserse adalah salah satu dari fungsi kepolisian yang bertugas untuk melakukan penyidikan untuk mencari informasi rahasia, sering disebut juga polisi rahasia. Dalam hal ini reserse mempunyai peranan yang besar dalam pengungkapan tindak pidana yang banyak terjadi dimasyarakat, salah satunya adalah mengungkap tindak pidana perdagangan orang. Perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan,

² Tim Redaksi Fokusmedia, 2004, *Lima Undang-Undang Penegak Hukum dan Keadilan*, Fokusmedia, Bandung, hlm.143.

penjeratan utang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Bentuk bentuk eksploitasi itu antara lain dengan cara memperlakukan korban untuk bekerja yang mengarah pada praktik-praktik eksploitasi seksual, perbudakan atau bentuk-bentuk perbudakan modern, perbuatan transplantasi organ tubuh untuk tujuan komersial, sampai penjualan bayi yang dimaksudkan untuk tujuan dan kepentingan mendapatkan keuntungan besar bagi para pelaku perdagangan orang.³

Keterdesakan masalah ekonomi merupakan penyebab utama banyaknya korban terjerumus ke dalam lingkaran perdagangan orang. Masalah ekonomi membuat manusia mencari jalan keluar yang mudah dan cepat untuk memenuhi setiap kebutuhannya, ketersediaan lapangan pekerjaan tidak lagi sesuai dengan laju pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan perekonomian.⁴ Irianto Sulistiawati menyatakan bahwa sindikat *trafficking* merupakan sindikat yang tidak hanya terdiri dari pria yang bertampang sangar, sadis, tega menyakiti dan bersenjata, tetapi juga pasangan suami istri yang kelihatan baik sekali, maupun gadis-gadis cantik dan pria-pria kemayu. Sindikat ini selalu berganti wajah dan

³Farhana, S.H., M.H., Pdi., 2012, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 6.

⁴ Moh.Hatta, S.H., M.Kn, 2012, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori dan Praktek*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, hlm.2.

menipu calon korban bahkan terlihat sangat baik dan orang-orang yang mempunyai pekerjaan seakan-akan tetap.⁵

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta (hak-hak yang bersifat kodrati). Karena itu tidak ada kekuasaan apapun didunia yang dapat mencabutnya. Meskipun demikian tidak berarti dengan hak-haknya itu orang dapat berbuat semaunya. Sebab, apabila seseorang melakukan sesuatu yang dapat dikategorikan melanggar hak asasi orang lain, maka ia harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.⁶

Indonesia menjadi salah satu negara asal perdagangan orang di dunia. Dari data yang dirilis *International Organization for Migration* (IOM) Indonesia tahun 2011, Indonesia menempati peringkat teratas dengan jumlah korban 3.943 korban perdagangan manusia.⁷

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin meneliti lebih lanjut, dengan mengambil judul PERAN POLDA DIY DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

⁵ Irianto Sulistiawati, 2006, *Perempuan dan Hukum menuju yang prospektif kesetaraan dan Keadilan*, Yayasan obor Indonesia, Jakarta, hlm. 261.

⁶ Hj. Henny Nuraeny. 2011, *Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pertama*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 168.

⁷ <http://kanaltiga.blogspot.com/2013/02/kasus-perdagangan-manusia-indonesia.html>, diunduh tanggal 17 Februari 2015

- a. Bagaimanakah peran Polda DIY dalam menanggulangi Tindak Pidana perdagangan orang?
- b. Apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh Polda DIY dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang?

B. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dipergunakan adalah Metode penelitian hukum normatif empiris yaitu pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai penunjang.

2. Sumber Data

Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang meliputi:
 - 1.) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 2.) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 - 3.) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.
 - 4.) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum dan pendapat hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berkaitan dengan penelitian ini, diperoleh dari buku, website, jurnal, surat kabar, dan makalah.
 - c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum untuk memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

3. Metode pengumpulan data.

- a. Studi kepustakaan dengan melakukan pengumpulan data dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur serta dokumen-dokumen yang terkait dengan obyek yang diteliti dan selanjutnya dipelajari sebagai satu kesatuan.
- b. Wawancara secara langsung dengan mengajukan pertanyaan pada narasumber / pihak-pihak yang terkait tentang obyek yang diteliti

berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya terhadap Bapak Nandang Rochman, SH.,MH. selaku Panit I Unit C Subdit III Ditreskrimum Polda DIY. Wawancara dilakukan dengan menggunakan bentuk pertanyaan terbuka yaitu bentuk pertanyaan yang jawabannya adalah penjelasan dari narasumber.

4. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Metode Analisis data

Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan. Proses penalaran dalam menarik kesimpulan digunakan metode berpikir deduktif. Metode deduktif adalah cara analisis dari kesimpulan umum atau jeneralisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan atau jeneralisasi tersebut.

C. Peran dan kendala Polda DIY dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang

1. Peran Polda DIY dalam menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang

Sesuai dengan Tugas pokok dan fungsinya melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan informasi laporan ataupun tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat. Dalam upaya sebagai berikut:

a. Upaya Pre-Emtif

Upaya pre-emptif adalah upaya untuk mendeteksi keadaan awal, pencegahan yang dilakukan secara dini melalui kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasaran mempengaruhi faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan perdagangan anak. Upaya pre-emptif ini memerlukan adanya peran intelegen untuk memberikan informasi. melakukan pembinaan-pembinaan kepada masyarakat, Bapak Nandang Rochman, SH.,MH., mengatakan sekarang ini lagi gencar-gencarnya bina mitra pembinaan terhadap masyarakat dengan Linmas ke pelosok pelosok, kampung-kampung, sekolah, kampus maupun instansi-instansi terkait. Polisi itu menyampaikan sifatnya itu dalam bentuk dialoghis, ceramah, media sosial dan elektronik, apapun ditempuh oleh kepolisian dalam menyampaikan bahaya kejahatan perdagangan orang beserta akibat-akibatnya.

b. Upaya Preventif

Upaya Preventif adalah upaya pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya suatu kejahatan. Langkah-langkah pencegahan atau

upaya non penal yang meliputi tugas-tugas pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli, agar tidak terjadi pelanggaran hukum atau tindak pidana dan tercipta keamanan, ketertiban serta ketentraman dalam masyarakat. Upaya preventif yang dilakukan Polda DIY lebih kepada sosialisasi dimasyarakat, antara lain:

- 1) Polda DIY menjalin kemitraan dengan masyarakat untuk bekerja sama saling melindungi, menjaga lingkungan mereka.
- 2) Mengajak masyarakat untuk berkoordinasi jika melihat terjadinya kejahatan perdagangan orang agar segera melapor kepada pihak yang berwenang.
- 3) Polda DIY memberikan penyuluhan-penyuluhan serta mengajak orang tua untuk lebih memperhatikan anak-anaknya.
- 4) Polda DIY bekerja sama dengan pihak sekolah dan lingkungan sekolah, kampus.
- 5) Mengedarkan brosur (himbauan) keseluruh lapisan masyarakat yang isinya mengajak agar masyarakat tidak mudah tergiur oleh orang-orang mengatas namakan instansi tertentu untuk menawarkan pekerjaan dan dalam brosur Polda DIY juga memaparkan dampak-dampak dari *trafficking*.

Dilakukannya berbagai upaya preventif ini ditujukan agar masyarakat dapat membantu Polda DIY secara langsung untuk mencegah terjadinya kejahatan perdagangan orang. Upaya ini

diharapkan dapat menekan tingginya angka kejahatan perdagangan orang yang terjadi setiap waktu.

c. Upaya Represif

Upaya represif adalah upaya yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan, penindakan atau upaya hukum.

Bapak Nandang Rochman, SH.,MH., mengatakan Upaya represif yang dilakukan Polda DIY adalah dengan melalui penyelidikan, penangkapan, penyidikan, hingga sampai pada peradilan yang kemudian diputuskan oleh hakim. Upaya represif mendasarkan pada bukti awal yang ada, melakukan penangkapan dan diteruskan pada langkah penyidikan dengan menghubungkan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan bila bukti itu telah cukup maka perkara dilimpahkan ke Kejaksaan.

Dilakukannya upaya represif ini bertujuan untuk pemberian sanksi bagi para pelaku tindak pidana perdagangan orang. Para pelaku yang diduga melakukan perdagangan orang akan diperiksa dan dilakukan penyelidikan guna mencari bukti-bukti awal yang kemudian akan dilakukan penyidikan untuk memastikan kejahatan yang mereka perbuat. Setelah mendapat banyak bukti serta saksi maka akan dapat diteruskan ke pengadilan dan akan mendapat putusan hakim.

Upaya represif ini merupakan suatu usaha yang lebih bersifat pada penindakan/pemberantasan setelah tindak pidana perdagangan orang itu terjadi. Berdasarkan hasil penelitian dengan Bapak Nandang Rochman, SH.,MH.,AKP, bahwa upaya awal yang dilakukan adalah dengan menangkap pelaku perdagangan orang. Proses penegakan hukum pidana termasuk tindak pidana perdagangan orang ini melalui suatu sistem yang terdiri dari empat tahap proses, yaitu:

- 1) tahap penyelidikan / penyidikan
- 2) tahap penuntutan;
- 3) tahap pemidanaan; dan
- 4) tahap pelaksanaan
- 5) tahap peradilan

2. Kendala Polda DIY Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang

Kendala yang dihadapi Polda DIY dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang, yaitu:

- a. Masih ada masyarakat yang kurang peduli dengan lingkungannya dengan tidak saling memperhatikan, menjaga, memberikan laporan kepada kepolisian tentang keadaan sekitarnya sehingga mempersulit kinerja pihak polda DIY dalam penanganan kejahatan perdagangan orang.
- b. Dalam proses penyidikan mengenai identitas tersangka yang bertempat tinggal diluar kota akan memakan waktu yang sangat lama bila

tersangkanya melakukan upaya jaminan karena di satu sisi pihak kepolisian di kejar oleh target waktu penyelidikan yang harus di selesaikan dalam tenggang waktu sebulan sampai dua bulan.

- c. Sarana prasarana atau fasilitas yang mendukung untuk mempermudah pihak kepolisian dalam mengungkap tindak pidana perdagangan orang.
- d. Sumber daya manusia, dalam hal ini yang dimaksudkan adalah polisi. Kurangnya pengetahuan, keahlian, kemauan, kemampuan dan kurang menguasai teknologi informasi dan komunikasi sangat berpengaruh terhadap penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang.
- e. Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah dan faktor ekonomi yang kurang mampu sehingga banyak orang-orang yang melakukan kegiatan jual-beli manusia.
- f. Polda DIY mengalami kesulitan dalam memperoleh laporan.
- g. Lemahnya koordinasi antara aparat penegak hukum, koordinasi dan kerjasama antar penegak hukum mempunyai peran yang sangat menentukan keberhasilan tugas terutama dalam menegakkan hukum dan keadilan serta melindungi sekaligus menyelesaikan masalah yang dihadapi korban perdagangan orang, dari perspektif hukum koordinasi ini tidak hanya terbatas pada sesama penegak hukum melainkan juga dengan instansi lain.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Polda DIY dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang meliputi: Upaya pre-emptif yaitu dengan melakukan pembinaan-pembinaan kepada masyarakat, peningkatan pendidikan masyarakat, bina mitra dengan masyarakat, khususnya tentang kejahatan perdagangan orang, dan peningkatan pengetahuan masyarakat melalui pemberian informasi seluas-luasnya. Selain itu polda DIY menggunakan Upaya preventif yaitu dengan melakukan sosialisasi dimasyarakat seperti mengajak masyarakat untuk bekerja sama saling melindungi disekitar lingkungan mereka; mengajak masyarakat untuk berkoordinasi jika melihat terjadinya kejahatan perdagangan orang agar segera melapor kepada pihak yang berwenang; mengedarkan brosur (himbauan) keseluruh lapisan masyarakat yang isinya mengajak agar masyarakat tidak mudah tergiur oleh orang-orang mengatas namakan instansi tertentu untuk menawarkan pekerjaan dan dalam brosur Polda DIY juga memaparkan dampak-dampak dari *trafficking*. Hal ini agar dapat menekan tingginya angka tindak pidana perdagangan orang yang terjadi setiap waktu. Dengan adanya upaya pre-emptif dan preventive, upaya kepolisian DIY dilengkapi dengan Upaya represif yaitu dengan melalui penyelidikan, penangkapan, penyidikan, hingga sampai pada peradilan yang kemudian diputuskan oleh hakim.

2. Kendala yang di hadapi oleh Polda DIY Dalam Menanggulangi Tindak pidana Perdagangan Orang adalah :
- a. Masih ada masyarakat yang kurang peduli dengan lingkungannya dengan tidak saling memperhatikan, menjaga, memberikan laporan kepada kepolisian tentang keadaan sekitarnya sehingga mempersulit kinerja pihak polda DIY dalam penanganan kejahatan perdagangan orang.
 - b. Dalam proses penyidikan mengenai identitas tersangka yang bertempat tinggal diluar kota akan memakan waktu yang sangat lama bila tersangkanya melakukan upaya jaminan karena di satu sisi pihak kepolisian di kejar oleh target waktu penyelidikan yang harus di selesaikan dalam tenggang waktu sebulan sampai dua bulan.
 - c. Sarana prasarana atau fasilitas yang mendukung untuk mempermudah pihak kepolisian dalam mengungkap kejahatan perdagangan orang.
 - d. Sumber daya manusia, dalam hal ini yang dimaksudkan adalah polisi. Kurangnya pengetahuan, keahlian, kemauan, kemampuan dan kurang menguasai teknologi informasi dan komunikasi sangat berpengaruh terhadap penanganan kasus kejahatan perdagangan orang.
 - e. Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah dan faktor ekonomi yang kurang mampu sehingga banyak orang yang melakukan kegiatan jual-beli manusia.
 - f. Polda DIY mengalami kesulitan dalam memperoleh laporan.

g. Lemahnya koordinasi antara aparat penegak hukum, koordinasi dan kerjasama antar penegak hukum mempunyai peran yang sangat menentukan keberhasilan tugas terutama dalam menegakkan hukum dan keadilan serta melindungi sekaligus menyelesaikan masalah yang dihadapi korban perdagangan orang, dari perspektif hukum koordinasi ini tidak hanya terbatas pada sesama penegak hukum melainkan juga dengan instansi lain.

E. Saran

1. Masyarakat agar lebih menyadari akan bahaya dari tindak pidana perdagangan orang. Masyarakat dalam hal ini lebih kooperatif, bekerja sama hendaknya dapat membantu memberikan informasi tentang adanya tindak pidana perdagangan anak disekitar lingkungannya kepada pihak kepolisian.
2. Bagi polisi kiranya dapat lebih bekerjasama dengan masyarakat supaya informasi dari masyarakat mengenai pelaku tindak pidana perdagangan orang yang disampaikan dapat diterima dengan baik.

Setiap penegakan hukum sebaiknya dalam proses penyelesaiannya lebih di perhatikan dan dikaji serta ada pembenahan lagi untuk mencari penyebab utama terjadinya tindak pidana tersebut agar diselesaikan supaya tidak terjadi / terulang lagi tindak pidana yang sama.

Daftar Pustaka

Buku

- Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Farhana, 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Henny Nuraeny., 2011, *Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pertama*, Sinar Grafika, Jakarta.
- H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laks Bang Mediatama, Yogyakarta.
- Irianto Sulistiawati, 2006, *Perempuan dan Hukum menuju yang prospektif kesetaraan dan Keadilan*, Yayasan obor Indonesia, Jakarta.
- L.M. Lopian dan Hetty A. Geru, 2006, *Trafficking Perempuan dan Anak*, Pertama, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Moh.Hatta, 2012, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori dan Praktek*, Liberty Yogyakarta.
- Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, Grasindo, Jakarta.
- Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam hukum administrasi*, Laks Bang Presindo, Yogyakarta.
- , 2008, *Hukum Kepolisian Polri Dan Good Governance*, Pertama, Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Satjipto Raharjo, 2009, *Fungsi Penegakan Hukum*, Kompas, Jakarta.
- Tim Redaksi Fokusmedia, 2004, *Lima Undang - Undang Penegak Hukum dan Keadilan*, Fokusmedia, Bandung.

Peraturan Perundang - Undangan

- Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang - Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002.
- Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58.

Website

<http://kanaltiga.blogspot.com/2013/02/kasus-perdagangan-manusia-indonesia.html>, tanggal 17 Februari 2015 pukul 20.22 WITA.

<http://www.gugustugastrafficking.org/kasus-trafficking->, tanggal 19 Februari 2015 pukul 21.19 WITA.

<http://www.jogjatv.tv/berita/13/03/2012/polda-diyungkap-kasus-perdagangan-anak>, diunduh tanggal 19 Februari 2015 pukul 23.01 WITA.

<http://www.nakertrans.go.id/> Migrasi dan Penyelundupan Manusia, tanggal 18 Februari 2015 pukul 20.31 WITA.

<http://www.hukumsumberhukum.com/2014/06/apa-itu-pengertian-tindak-pidana.html>. Di unduh tanggal 25 mei 2015 pukul. 01.20. WITA

Kamus

Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Edisi Ketiga.